PERAN TINGKAT PENDIDIKAN DALAM MEMODERASI PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TAMBAKROMO

SKRIPSI
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh :
Endang Sri Rezeki
NIM 7101415069

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi	Pembimbing
Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si	Kardiyem, S.Pd., M.Pd.
NIP 198201302009121005	NIP. 198712282015042001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Agustus 2019

Penguji I

Drs. Kusmuriyanto, M.Si.
NIP. 196005241984031001

Penguji II

Ratieh Widhiastuti, S.Pd., M.Si.
NIP. 198601082015042001

Penguji III

Kardiyem, S.Pd., M.Pd.
NIP 198712282015042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Heri Yanto M.B.A., Ph.D.
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Endang Sri Rezeki
NIM	: 7101415069
Tempat Tanggal Lahir	: Pati, 27 Juni 1997
Alamat	: Ds. Mangunrekso Rt. 06, Rw. 02, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juli 2019

Endang Sri Rezeki

NIM 7101415069

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (**QS. Al-Insyirah:5**)
- Jangan pernah takut bermimpi, karena hidup berawal dari mimpi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya yaitu Bapak Mujimun dan Ibu Mukini, orang tua yang selalu mendukung apa yang saya cita-citakan, selalu sabar dalam menghadapi saya, selalu mendoakan yang terbaik untuk saya, dan tidak ada hentinya dalam memberi semangat untuk saya.
- Segenap keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk saya.
- Teman-teman Pendidikan Akuntansi 2015 Rombel B dan semua pihak yang telah membantu.
- Teman-teman dan adik-adik Kos Garini yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan apa yang sudah saya kerjakan.
- Kampus Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq, hidayah, dan Inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Peran Tingkat Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tambakromo" dapat peneliti selesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan syarat akademik dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah berpartisipasi. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian sampai terselesainya skripsi ini.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian sampai terselesainya skripsi ini.
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi.
4. Kardiyem, S.Pd., M.Pd., Dosen wali dan Dosen pembimbing yang telah sabar memberikan petunjuk, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Drs. Kusmuriyanto, M.Si. selaku dosen penguji I yang telah sabar memberikan koreksi, bimbingan, serta arahan untuk memperbaiki skripsi ini.

6. Ratieh Widhiastuti, S.Pd., M.Si. selaku dosen penguji II yang telah sabar memberikan koreksi, bimbingan, serta arahan untuk memperbaiki skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memberikan perhatian, semangat, serta doa yang tiada hentinya menglair demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh dosen serta staf karyawan di Universitas Negeri Semarang khususnya Jurusan Pendidikan Ekonomi yang memberikan banyak pengalaman, kesempatan belajar serta inspirasi selama penulis menjalani studi di Universitas Negeri Semarang.
9. Camat Kecamatan Tambakromo yang telah memberikan izin dan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti berharap semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Juli 2019

Peneliti

SARI

Rezeki, Endang Sri. "*Peran Tingkat Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tambakromo*". Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Kardiyem, S.Pd., M.Pd.
Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa belum maksimal. Pengelolaan dana desa yang belum maksimal memunculkan masalah seperti terjadinya kasus-kasus korupsi dan kesalahan-kesalahan administratif yang terjadi di banyak desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pengelola dana desa di Kecamatan Tambakromo berkaitan dengan peran tingkat pendidikan dalam memoderasi kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa pengelola di Kecamatan Tambakromo. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah responden sebanyak 72 orang. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kasie pembangunan dari 18 desa di Kecamatan Tambakromo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Tingkat pendidikan memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan dana desa. Tingkat pendidikan tidak berhasil memoderasi pengaruh komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan analisis, kesimpulan dari penelitian ini adalah kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan dana desa. tingkat pendidikan tidak berhasil memoderasi pengaruh komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa. Peneliti menyarankan agar aparatur pemerintah desa meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan dan membaca literatur, mengadakan pelatihan siskeudes, membuat jadwal pemeliharaan peralatan, serta memberikan *reward* untuk aparat yang berprestasi. Pemerintah desa memberikan persyaratan khusus dalam prekrutan aparatur pengelola dana desa. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya diteliti faktor lain dalam pengelolaan dana desa, seperti penggunaan siskeudes. Hal ini diupayakan agar pengelolaan dana desa semakin baik.

ABSTRACT

Rezeki, Endang Sri. "*The Role of Educational Levels in Moderating the Effect of Apparatus Competence, Organizational Commitment, Use of Information Technology on Management of Village Funds in Tambakromo District*". Essay. Department of Economic Education. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang.
Counselor: Kardiyem, S.Pd., M.Pd.

Keywords: Level of Education, Apparatus Competence, Organizational Commitment, Use of Information Technology, Village Fund Management

The Management of village funds provided by the government to villages has not been maximized. The management of village funds that have not been maximized raises problems such as corruption cases and administrative errors that occur in many villages. The purpose of this research to analyze the management of village funds by the village fund management apparatus in Tambakromo Subdistrict related to the role of the education level in moderating apparatus competence, organizational commitment, and the use of information technology.

The population of this research is the village government administration apparatus in Tambakromo District. This study uses a saturated sample technique with 72 respondents. The sample in this study consisted of the village head, village secretary, village treasurer, and development head of 18 villages in Tambakromo District. This study uses a quantitative approach. The data collection method uses a questionnaire. Data analysis techniques used descriptive analysis and moderation regression with absolute difference test.

The results showed that there was a positive influence between the competence of the apparatus and the use of information technology on village fund management. Organizational commitment does not affect the management of village funds. The education level strengthen the influence of apparatus competence on village fund management. The educational level can not moderate the influence of organizational commitment and the use of information technology on village fund management.

Based on the analysis, this research concluded that the competence of the apparatus and the use of information technology influence the management of village funds. Organizational commitment does not influence on village fund management. The education level strengthen the influence of apparatus competence on village fund mangement. The education level can not moderate the influence organizational commitment and the use of information technology on village fund management. The researcher suggests that the village government apparatus increase their competence by attending training and reading literature, conducting a siskeudes training, making equipment maintenance schedules, and giving rewards to high performing officers. The village government provides special requirements in the recruitment of the village fund management apparatus. For further researchers, it should be investigated other factors in the management of village funds, such as the use of siskeudes. This has to strive for better management of village funds.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **Error! Bookmark not defined.**
PENGESAHAN KELULUSAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
PRAKATA vi
SARI viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
BAB I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 10
1.3. Cakupan Masalah 11
1.4. Perumusan Masalah 12
1.5. Tujuan Penelitian 12
1.6. Kegunaan Penelitian 13
1.6.1. Secara Teoritis 13
1.6.2. Secara Praktis 13
1.7. Orisinalitas 14
BAB II Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian 16
2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*) 16
2.2. Kajian Variabel Penelitian 17
2.2.1. Pengelolaan Dana Desa 17
2.2.1.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa 17
2.2.1.2. Pengelolaan Dana Desa 18

2.2.1.3.Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa 20
2.2.1.4.Indikator Pengelolaan Dana Desa 21
2.2.2. Kompetensi Aparatur 21
2.2.2.1.Pengertian Kompetensi Aparatur 21
2.2.2.2.Karakteristik Kompetensi Aparatur 24
2.2.2.3.Manfaat Penggunaan Kompetensi Aparatur 24
2.2.2.4.Indikator Kompetensi Aparatur 25
2.2.3. Komitmen Organisasi 26
2.2.3.1.Pengertian Komitmen Organisasi 26
2.2.3.2.Tipe Komitmen Organisasi 28
2.2.3.3.Membangun Komitmen Organisasi 29
2.2.3.4.Indikator Komitmen Organisasi 30
2.2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi 31
2.2.4.1.Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi 31
2.2.4.2.Pengelompokan Teknologi Informasi 33
2.2.4.3.Komponen Sistem Teknologi Informasi 34
2.2.4.4.Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi 34
2.2.5. Tingkat Pendidikan 35
2.2.5.1.Pengertian Tingkat Pendidikan 35
2.2.5.2.Ruang Lingkup Pendidikan 36
2.2.5.3.Tujuan Pendidikan 36
2.2.5.4.Indikator Tingkat Pendidikan 37
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu 38
2.4. Kerangka Berfikir 47
2.4.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pengelolaan Dana Desa 47
2.4.2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa 49

2.4.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Dana Desa 50
2.4.4. Peran Tingkat Pendidikan dalam Memperkuat Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pengelolaan Dana Desa 51
2.4.5. Peran Tingkat Pendidikan dalam Memperkuat Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa 53
2.4.6. Peran Tingkat Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Dana Desa 54
2.5. Hipotesis Penelitian 56
BAB III Metode Penelitian 58
3.1. Jenis dan Desain Penelitian 58
3.2. Populasi 58
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 60
3.3.1. Pengelolaan Dana Desa (Y) 60
3.3.2. Kompetensi Aparatur (X_1) 60
3.3.3. Komitmen Organisasi (X_2) 61
3.3.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) 62
3.3.5. Tingkat Pendidikan (M) 63
3.4. Teknik Pengumpulan Data 64
3.5. Uji Instrumen Penelitian 65
3.5.1. Uji Validitas 66
3.5.2. Uji Reliabilitas 69
3.6. Teknik Analisis Data 70
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 70
3.6.1.1. Variabel Tingkat Pendidikan 71
3.6.1.2. Variabel Kompetensi Aparatur 72
3.6.1.3. Variabel Komitmen Organisasi 72
3.6.1.5. Variabel Pengelolaan Dana Desa 73
3.6.2. Analisis Uji Regresi Moderasi 74
3.6.2.1. Uji Prasyarat 74

3.6.2.1.1. Uji Normalitas 74
3.6.2.1.2. Uji Linearitas 75
3.6.2.2.Uji Asumsi Klasik 75
3.6.2.2.1. Uji Multikolinearitas 75
3.6.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas 75
3.6.2.3.Uji Nilai Selisih Mutlak 76
3.6.2.4.Uji Hipotesis 78
3.6.2.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 78
3.6.2.4.2. Koefisien Determinasi Secara Parsial (r^2) 78
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 79
4.1. Hasil Penelitian 79
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian 79
4.1.2. Deskripsi Responden 81
4.1.3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 83
4.1.3.1.Analisis Deskriptif Pengelolaan Dana Desa 83
4.1.3.2.Analisis Deskriptif Kompetensi Aparatur 85
4.1.3.3.Analisis Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi 87
4.1.3.4.Analisis Deskriptif Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 89
4.1.3.5.Analisis Deskriptif Variabel Tingkat Pendidikan 92
4.1.4. Analisis Uji Regresi Moderasi 94
4.1.4.1.Uji Prasyarat 94
4.1.4.1.1. Uji Normalitas 94
4.1.4.1.2. Uji Linearitas 95
4.1.4.2.Uji Asumsi Klasik 96
4.1.4.2.1. Uji Multikolinearitas 96
4.1.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas 97
4.1.4.3.Uji Nilai Selisih Mutlak 98

4.1.4.4.Uji Hipotesis Penelitian 101
4.1.4.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 101
4.1.4.4.2. Koefisien Deterninasi secara parsial (r^2) 104
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 107
4.2.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pengelolaan Dana Desa..... 107
4.2.2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa..... 110
4.2.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Dana Desa 112
4.2.4. Peran Tingkat Pendidikan Memperkuat Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pengelolaan Dana Desa 114
4.2.5. Peran Tingkat Pendidikan Memperkuat Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa 116
4.2.6. Peran Tingkat Pendidikan Memperkuat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Dana Desa..... 119
BAB V Penutup..... 122
5.1. Simpulan..... 122
5.2. Saran..... 122
DAFTAR PUSTAKA 125
LAMPIRAN..... 130

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu 38
Tabel 3. 1. Jumlah Aparatur Pengelola Dana Desa di Kecamatan Tambakromo..59
Tabel 3. 2. Penskoran Pernyataan pada Angket Variabel Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi..... 65
Tabel 3. 3. Penskoran Pernyataan pada Angket Variabel Tingkat Pendidikan.....65
Tabel 3. 4. Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pendidikan..... 66
Tabel 3. 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparatur..... 67
Tabel 3. 6. Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi.....67
Tabel 3. 7. Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi..... 68
Tabel 3. 8. Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa.....69
Tabel 3. 9. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen..... 70
Tabel 3. 10. Jenjang Kriteria Variabel Tingkat Pendidikan.....72
Tabel 3. 11. Jenjang Kriteria Variabel Kompetensi Aparatur.....72
Tabel 3. 12. Jenjang Kriteria Variabel Komitmen Organisasi.....73
Tabel 3. 13. Jenjang Kriteria Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.....73
Tabel 3. 14. Jenjang Kriteria Variabel Pengelolaan Dana Desa..... 74
Tabel 4. 1. Jumlah Kuesioner yang Dihimpun…..... 80
Tabel 4. 2. Tingkat Penyebaran Kuesioner 81
Tabel 4. 3. Deskripsi Responden Penelitian..... 81
Tabel 4. 4. Deskriptif Statistik Variabel Pengelolaan Dana Desa..... 83
Tabel 4. 5. Deskriptif Statistik Variabel Pengelolaan Dana Desa..... 84
Tabel 4. 6. Analisis Deskriptif Indikator Variabel Pengelolaan Dana Desa..... 84
Tabel 4. 7. Deskriptif Statistik Variabel Kompetensi Aparatur 85
Tabel 4. 8. Distribusi Frekuensi Variabel Kompetensi Aparatur..... 86
Tabel 4. 9. Analisis Deskriptif Indikator Variabel Kompetensi Aparatur 86
Tabel 4. 10. Deskriptif Statistik Variabel Komitmen Organisasi 87
Tabel 4. 11. Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Organisasi 88
Tabel 4. 12. Analisis Deskriptif Indikator Variabel Komitmen Organisasi..... 89

Tabel 4. 13. Deskriptif Statistik Pemanfaatan Teknologi Informasi 89
Tabel 4. 14. Distribusi Frekuensi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 90
Tabel 4. 15. Analisis Deskriptif Indikator Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 91
Tabel 4. 16. Deskriptif Statistik Tingkat Pendidikan 92
Tabel 4. 17. Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Pendidikan 93
Tabel 4. 18. Hasil Uji Normalitas 94
Tabel 4. 19. Hasil Uji Linearitas 95
Tabel 4. 20. Hasil Uji Multikolinearitas 96
Tabel 4. 21. Hasil Uji Heteroskedastisitas 97
Tabel 4. 22. Hasil Uji Regresi Moderasi (Uji Nilai Selisih Mutlak) 98
Tabel 4. 23. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 102
Tabel 4. 24. Koefisien Determinasi secara Parsial (r^2) 104
Tabel 4. 25. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir..... 56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Responden Uji Coba Instrumen Penelitian 131
Lampiran 2 Kisi-kisi Uji Coba Instrumen Penelitian..... 133
Lampiran 3 Kuesioner Uji Coba Penelitian 136
Lampiran 4 Tabulasi Uji Coba Penelitian..... 145
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas 155
Lampiran 6 Hasil Uji Reliabilitas 173
Lampiran 7 Daftar Responden Penelitian 174
Lampiran 8 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 177
Lampiran 9 Kuesioner Penelitian..... 179
Lampiran 10 Tabulasi Hasil Penelitian 187
Lampiran 11 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel 206
Lampiran 12 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator..... 208
Lampiran 13 Hasil Uji Prasyarat..... 219
Lampiran 14 Hasil Uji Asumsi Klasik 220
Lampiran 15 Hasil Penelitian..... 221
Lampiran 16 Surat Izin Penelitian..... 222

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan ujung organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan pemerintah dari urusan pemerintahan. Desa merupakan tingkatan organisasi terkecil dalam pemerintahan, sehingga informasi sangat mudah disampaikan dan tingkat kedekatan dengan masyarakat masih sangat erat. Berbeda dengan pemerintah pusat, apabila menyampaikan informasi kepada masyarakat harus melalui beberapa tahapan, sehingga baru tersampaikan di masyarakat. Desa mempunyai peran untuk mengurus masyarakat serta mengatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang salah satu pasalnya menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Kendala tersebut disebabkan oleh keuangan desa yang sumbernya belum jelas. Desa yang diharapkan memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), akan tetapi masih banyak yang belum memiliki. Beberapa desa belum sadar akan potensi desanya, berbeda dengan yang memiliki kekayaan wisata. Kendala yang dialami oleh pemerintah desa ini telah mendapat solusi yaitu berupa dana desa. Dana desa ini diharapkan mampu menjadi modal untuk pengembangan desa agar desa menjadi lebih mandiri.

Desa diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola dan mengolah potensi serta sumber daya yang dimilikinya. Hal ini dilakukan supaya desa dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Dana desa dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan desa, seperti jalan, jembatan, pos yandu, dan fasilitas lainnya dapat digunakan bersama oleh masyarakat desa. Harapannya sebagian dari dana desa tidak hanya disalurkan untuk pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi juga disalurkan untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes diadakan untuk mengolah potensi desa, misalnya desa yang memiliki potensi pariwisata. Desa yang tidak memiliki potensi khusus bisa membangun usaha sendiri seperti koperasi, PAM, dan usaha yang lain. Hal ini dimaksudkan agar desa dapat menjadi desa yang mandiri, dan mengurangi pengangguran di desa tersebut.

Pemerintah pusat setiap tahun telah memberikan anggaran yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Bersumber dari Buku Saku Dana Desa disebutkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat yang dimulai dari tahun 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun dengan rata-rata desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta setiap desa. Pada tahun 2016 dana tersebut naik menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata sebesar Rp. 628 juta setiap desa. Pada tahun 2017 dana desa meningkat menjadi Rp. 60 triliun dan setiap desa memperoleh rata-rata sebesar Rp. 800 juta. Tahun 2018 kenaikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dana desa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh desa yang ada di Indonesia.

Berdasarkan evaluasi selama tiga tahun yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017 terhadap pelaksanaan dana desa, dana desa telah menghasilkan sarana/ prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu: terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa, 914 ribu meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit tambatan perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit Polindes, 19.485 unit sumur, 3.106 pasar desa, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unit Posyandu, dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Dana desa tidak hanya menghasilkan sarana dan prasarana yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan untuk desa dalam mengembangkan ekonomi masyrakat. Pengembangan ekonomi masyarakat ini melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Dana desa selama tahun 2016-2017 telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017, menurunnya jumlah penduduk miskin pedesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta pada tahun 2017, dan adanya penurunan persentase penduduk miskin pedesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017.

Dana desa dengan jumlah yang sangat besar tersebut harus dikelola dengan baik supaya menghasilkan *output* sesuai dengan harapan pemerintah. Pengelolaan dana desa meliputi lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Desa dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk melaksanakan hak, kewenangan, dan kewajibannya

dituntut agar akuntabel dan transparan. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Siklus pengelolaan ini tidak akan berjalan tanpa adanya pemerintah desa. Pengelolaan dana desa dituntut akuntabel dan transparan akan tetapi masih banyak kasus mengenai dana desa yang tercatat oleh BPK.

Bersumber dari detik news, masih terdapat pengaduan terkait pelanggaran dana desa. Tahun 2016 terkumpul aduan kasus dana desa sejumlah 932 aduan. Berhubungan dengan penyelenggaraan negara 200 kasus diserahkan ke KPK, 167 diserahkan ke kepolisian, dan sisanya merupakan kesalahan administratif. Berdasarkan total jumlah pengaduan, 67 kasus pengaduan masuk ke meja hijau. Pengaduan yang tercatat sampai April 2018 terdapat 1.371 pengaduan (detik.com, 29 November 2018). Berdasarkan berita tersebut dalam pengelolaan dana desa masih ditemukan banyak permasalahan. Masalah administratif adalah salah satu permasalahan yang ada, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan dana desa. Dana desa harus menjujung asas-asas yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bersumber dari Surat Harian Suara Merdeka, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah menyatakan berdasarkan pemeriksaan semester kedua tahun 2018 atas kelola dana desa di delapan kabupaten ditemukan banyak permasalahan.

Berdasarkan temuan BPK tersebut memperkuat dugaan bahwa pengelolaan dana desa masih belum baik dan rentan korupsi. Hal ini sesuai dengan hasil pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) bahwa sejak tahun 2015 hingga semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 terdapat 17 kasus korupsi, kemudian tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Tahun 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. Pada semester I tahun 2018 sudah terdapat 27 kasus korupsi dana desa (Suara Merdeka, 20 Desember 2018).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan alokasi yang cukup besar dari dana desa. Dana tersebut kemudian didistribusikan ke tiap-tiap kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pati adalah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kabupaten ini mendapatkan alokasi dana desa yang cukup besar. Tahun 2018 Kabupaten Pati mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 362 miliyar yang akan didistribusikan kepada 401 desa yang ada di Kabupaten Pati.

Dana yang jumlahnya tidak sedikit harus dikelola dengan baik oleh aparatur pemerintah desa yang kompeten dan berkualitas. Pengelolaan harus sesuai dengan prinsip pengelolaan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berbeda dengan hasil yang diharapkan kasus pengelolaan dana desa masih banyak ditemukan. Hal ini dibuktikan dengan berita yang dimuat oleh detik.com (29 November 2018) dan suara merdeka (20 Desember 2018).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan dana desa. Beberapa desa masih mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hal ini berdampak pada penyerapan dana desa tahap berikutnya terhambat. Sistem pelaporan siskeudes yang *online* dan sering *upgrade* menyebabkan pelaku desa kesulitan dan menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tambakromo, banyak operator siskeudes yang sering berganti sehingga diperlukan Bimtek ulang.

Faktor-faktor dalam pengelolaan dana desa di Indonesia sudah diteliti dalam beberapa penelitian terdahulu dan masih ditemukan ketidakkosistenan hasil dari penelitian tersebut. Hal lain yang melatar belakangi penelitian ini adalah terjadinya beberapa masalah mengenai pengelolaan dana desa seperti keterlambatan dalam pelaporan dan kendala dalam penggunaan siskeudes. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan aparatur pemerintah desa yang pada prinsipnya mengutamakan kepentingan masyarakat.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah Teori *Stewardship* (Donaldson & Davis, 1991). Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang tidak berorientasi pada laba akan tetapi lebih pada pelayanan yang baik untuk masyarakat pada prinsipnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian ini yang dimaksud instansi

pemerintah adalah pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa diharapkan tidak mengutamakan kepentingan individu tetapi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga hasil dari pekerjaan aparatur pemerintah desa lebih efisien dan efektif, khususnya dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan teori tersebut aparatur pengelola dana desa akan melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengelola dana desa. Penelitian Hadiyati (2018) menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu sarana dan prasarana yang memadai, pengalaman dan tingkat pendidikan perangkat desa serta sumber daya manusia perangkat desa. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang faktor yang mempengaruhi pengeloaan dana desa maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai faktor kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan tingkat pendidikan terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor yang pertama yaitu kompetensi aparatur. Teori *Stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991) menyebutkan bahwa yang diharapkan dari aparatur pengelola dana desa adalah hasil yang baik. Hasil pengelolaan dana desa akan baik apabila aparatur pemerintah desa memiliki kompetensi untuk mengelola dana dana desa. Hasil pengelolaan dana desa akan semakin baik apabila kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pengelola dana desa semakin baik.

Faktor yang kedua yaitu komitmen organisasi. Terori *Stewardship* (Donaldson dan davis, 1991) menjelaskan bahwa manajer lebih terfokus pada kepentingan organisasi, dalam hal ini berarti aparatur pemerintah desa pengelola dana desa akan lebih terfokus pada tugasnya mengelola dana desa. Komitmen

organisasi akan membuat aparatur pengelola dana desa lebih mempriotitaskan tugasnya dalam mengelola dana desa. Aparatur yang yang memiliki komitmen organisasi yang baik akan mengelola dana desa dengan baik sehingga semakin

Faktor yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teori *Stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991) menjelaskan bahwa yang diharapkan oleh para aparatur bukan untuk kepentingan individu melainkan untuk hasil dari tugas yang terselesaikan dengan baik. Pengelolaan dana desa sudah memiliki prosedur yang sudah ditetapkan dari pemerintah pusat melalui Bupati, salah satunya menggunakan aplikasi siskeudes. Aparatur pengelola dana desa harus dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan maksimal agar dapat mengelola dana desa dengan baik. Aparatur yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang baik juga.

Faktor yang keempat yaitu tingkat pendidikan. Teori *Stewardship* (Donalson dan Davis, 1991) mengemukakan bahwa hal yang diprioritaskan adalah hasil dari sebuah organisasi tanpa mementingkan kepentingan individunya. Tingkat pendidikan dan pengalaman merupakan salah satu cara aparatur pengelola dana desa dalam memperoleh pengetahuan dan beradaptasi dalam mengelola dana desa. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin baik pemahamannya dalam mengelola dana desa sehingga pengelolaan dana desa yang dihasilkan baik.

Faktor-faktor di atas diteliti oleh penelitian terdahulu dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Aulia (2018) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 28,8%.

Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Medianti (2018) bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif sebesar 35,2%. Berbeda dengan hasil penelitian Widyatama, Novita, dan Diarespati (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Faktor kedua yang diteliti oleh penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang seirama akan tetapi dengan jumlah pengaruh yang berbeda-beda. Penelitian pertama oleh Mada, Kalangi, dan Gamalie (2017) yang mengemukakan hasil bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh sebesar 42,6% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Aulia (2018) bahwa komitmen organisasi berpengaruh sebesar 25,8 terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian dari Medianti juga menampilkan hasil yang sama bahwa komitmen organisasi berpengaruh sebesar 16,2% terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga juga memiliki ketidakkonsistenan hasil pada penelitian terdahulu. Penelitian Putri (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh sebesar 8,4% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Andriyani (2017) yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka peneliti ingin meneliti kembali dengan menghadirkan variabel moderasi yaitu tingkat pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk memantapkan hasil penelitian terdahulu

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Kecamatan Tambakromo. Peneliti menghadirkan variabel baru yaitu tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi merupakan modal yang sangat penting. Sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan cara menempuh pendidikan yang tinggi. Seseorang akan mengembangkan kemampuan dan potensi diri ketika mereka belajar. Tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan memperkuat kompetensi aparatur dalam pengelolaan dana desa. Sama halnya dengan komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan diperkuat dan pengelolaan dana desa menjadi semakin baik. Variabel ini diduga memberikan pengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan dana desa sehingga dapat memperkuat pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul "**Peran Tingkat Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tambakromo**".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah untuk dicari penyelesaiannya:

1. Dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa sangat besar, sehingga banyak perangkat desa yang menyalahgunakan dana tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa.

2. Terjadi berbagai macam pelaporan kasus dana desa sehingga pengelolaan dana desa masih harus diawasi.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa menurut Hadiyati (2018) yaitu sarana dan prasarana yang memadai, pengalaman dan tingkat pendidikan perangkat desa serta sumber daya manusia perangkat desa.
4. Kurangnya kompetensi aparatur dalam membuat laporan keuangan sehingga permasalahan administrasi sering terjadi.
5. Kurangnya komitmen dalam berorganisasi sehingga muncul berbagai niat kecurangan dalam sebuah organisasi, karena kurangnya rasa memiliki dalam organisasi tersebut.
6. Tingkat pendidikan aparatur yang menjabat dalam strata pemerintahan desa rata-rata masih rendah yaitu rata-rata SD, SMP, dan SMA sedangkan aparatur yang merupakan lulusan sarjana serta dalam bidang akuntansi masih sangat jarang ditemui.

1.3. Cakupan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati yang dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi oleh tingkat pendidikan. Penelitian akan dilakukan di seluruh desa yang ada di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati yaitu sebanyak 18 desa.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh positif dan signifikan kompetensi aparatur terhadap pengelolaan dana desa?
2. Adakah pengaruh positif dan signifikan komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa?
3. Adakah pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa?
4. Adakah peran tingkat pendidikan dalam memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan dana desa?
5. Adakah peran tingkat pendidikan dalam memperkuat pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa?
6. Adakah peran tingkat pendidikan dalam memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan dana desa.
2. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa.
3. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap pengelolaan dana desa.
4. Menganalisis peran tingkat pendidikan dalam memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan dana desa.

5. Menganalisis peran tingkat pendidikan dalam memperkuat pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa.
6. Menganalisis peran tingkat pendidikan dalam memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa.

1.6. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1.6.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan pengelolaan dana desa mengenai pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan tekonologi informasi dan tingkat pendidikan terhadap pengelolaan dana desa.

1.6.2. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Universitas

   Penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan tingkat pendidikan terhadap pengelolaan dana desa.
2. Bagi Penulis

   Bagi Penulis diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, berkaitan dengan pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan pemanfaatan

tekonologi informasi yang dimoderasi oleh tingkat pendidikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.

3. Bagi Pemerintah Desa

   Bagi pemerintah desa sebagai unit analisis penelitian, harapannya penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa dan dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

1.7. Orisinalitas

Penelitian mengenai pengelolaan dana desa telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Larastika Medianti tahun 2018 mengenai pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bintan. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat dua variabel independen (komptetensi aparatur dan komitmen organisasi) dan variabel dependen (pengelolaan dana desa). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel independen dan variabel moderating. Penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan variabel moderating tingkat pendidikan aparatur desa.

Alasan menambah variabel independen tersebut mengacu pada penelitian oleh Aulia (2018) mengenai pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa,

komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penambahan variabel moderating tingkat pendidikan dalam penelitian ini didasari pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sasha Murina dan Rahmawaty tahun 2017 mengenai pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan desa (studi pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh). Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja memiliki pengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

Teori Utama dalam penelitian ini yaitu Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*). Teori *Stewardship* pertama kali dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991), teori ini mengemukakan bahwa manajer eksekutif ingin melakukan pekerjaan yang baik untuk menjadi pelayan yang baik bagi perusahaan. Teori ini menyatakan tidak ada motivasi untuk kepentingan manajer eksekutif, sehingga manajer eksekutif jauh dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik seperti yang dicita-citakan. Para manajer eksekutif tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada kepentingan perusahaan.

Peran Manajer eksekutif secara khusus akan membantu manajer dan anggota dewan perusahaan dalam mencapai kinerja yang unggul. Situasi tersebut akan tercapai apabila manajer eksekutif berperan sebagai ketua dewan yang memiliki kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang. Hal yang diharapkan kepemimpinan perusahaan akan lebih jelas dan konsisten baik bagi manajer dan anggota dewan perusahaan. Manfaat dengan adanya peran manajer eksekutif adalah kesatuan arah dan komando yang kuat dan terkontrol. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah Teori *Stewardship* tidak berfokus pada tujuan individu melainkan menjadi fasilitator dalam pemberdayaan untuk perusahaan. Penggabungan jabatan antara manajer eksekutif dengan manajer dan anggota dewan perusahaan akan meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam kepentingan perusahaan.

Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah, sebab instansi pemerintah tidak berorientasi pada laba namun lebih cenderung kepada pelayanan yang baik kepada masyarakat sebabagi prinsipnya. Instansi pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa yang memiliki tugas yang bertanggungjawab terhadap masyarakat desa. Salah satu tugas dan wewnang aparatur pemerintah desa yaitu mengelola dana desa. Aparatur pemerintah desa yang mengelola dana desa harus aparatur yang kompeten dan memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya. Aparatur pengelola dana desa seharusnya mengesampingkan kepentingan individunya dan lebih mengutamakan menjalankan tugasnya dalam mengelola dana desa, sebab yang diinginkan dari aparatur pemerintah desa adalah hasil terbaik untuk tugasnya yaitu dalam mengelola dana desa. Hasil yang baik dalam pengelolaan dana desa akan diperoleh apabila aparatur pemerintah desa yang memiliki dana desa memiliki kompetensi, komitmen dalam berorganisasi, dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Hal tersebut dapat ditungjang dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

2.2. Kajian Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki lima variabel penelitian yaitu kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, tingkat pendidikan dan pengelolaan dana desa.

2.2.1. Pengelolaan Dana Desa

2.2.1.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Dana desa menurut UU No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi

desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah, dimana pemerintah mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Yuliansyah dan Rusmianto, 2017: 32). Menurut Buku Saku Dana Desa (2017), " Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa". Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mendefinisikan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Medianti (2018) menyatakan "Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya". Pengelolaan keuangan desa akan berjalan ketika memiliki tata pemerintahan desa yang baik. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa adalah serangkaian siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dana desa yang digunakan dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.2.1.2. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan komponen dari keuangan desa, sehingga siklus pengelolaan dana desa sama dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014

yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan
   a. Sekretaris Desa (Sekdes) menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa (Kades) dan BPD.
   b. APBDesa kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
   c. APBDesa yang telah disampaikan kemudian dievaluasi oleh Bupati/ Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kades harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
   d. Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur masyarakat.
2. Pelaksanaan
   a. Pengeluaran dan penerimaan dana desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
   b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
   c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota.
   d. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan oleh Kades.
3. Penatausahaan

a. Penatausahaan ini wajib dilaksanakan oleh Bedahara Desa
b. Pencatatan dilakukan setiap ada penerimaan dan pengeluaran
c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan
d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat bulan berikutnya
f. Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan Buku Bank

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
   a. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun,
   b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan Perdes,
   c. Melampirkan format laporan berupa: pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, kekayaan milik desa per 31 Desember, serta program pemerintah dan pemda yang masuk ke desa.

2.2.1.3. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan komponen dari keuangan desa. Asas-asas pengelolaan dana desa sama dengan asas-asas keuangan desa. Menurut Buku Saku Dana Desa (2017) keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.2.1.4. Indikator Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014). Indikator dalam penelitian ini diambil dari Peraturan Menteri No. 113 Tahun 2014, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.2.2. Kompetensi Aparatur

2.2.2.1. Pengertian Kompetensi Aparatur

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Wibowo (2007:271) menyatakan “Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang

dituntut oleh pekerja tersebut". Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku di tempat kerja. Kinerja di pekerjaan dipengaruhi oleh: (a) pengetahuan, kemampuan dan sikap; (b) gaya kerja, kepribadian, kepentingan/ minat, dasar-dasar, nilai sikap, kepercayaan, dan gaya kepemimpinan.

"Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasi cara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode yang cukup lama" (Spencer dan Spencer, 1993). Definisi lain mengenai kompetensi yaitu kompetensi merupakan dimensi perilaku yang berada di belakang kinerja kompeten. Hal ini sering dinamakan kompetensi perilaku karena dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik (Armstrong dan Baron, 1998:298). Sutrisno (2009:203) menyatakan "Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan".

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Pengetahuan, keterampilan dan sikap ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian, yang diperoleh seorang melalui pendidikan dan

pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.

2. Keterampilan kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
   a. Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (*task skill*);
   b. Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*);
   c. Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/ masalah kerja yang berbeda (*contigency management skill*);
   d. Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (*job/role environment skill*) dan;
   e. Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tengah/ lingkungan kerja yang berbeda (*transfer skills*).
3. Sikap kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.

Kompetensi aparatur adalah kemampuan kerja setiap aparat pemerintah desa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Aulia (2018) menyatakan "Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal". Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa

kompetensi aparatur adalah kemampuan yang dimiliki oleh aparautur desa dalam menjalankan tugas berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang telah dimilikinya.

2.2.2.2. Karakteristik Kompetensi Aparatur

Karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer (1993) terdapat lima aspek, yaitu :

1. *Motives* adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan.
2. *Traits* adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu.
3. *Self concept* adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
4. *Knowledge* adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu.
5. *Skills* adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

2.2.2.3. Manfaat Penggunaan Kompetensi Aparatur

Konsep kompetensi telah diterapkan dalam berbagai aspek dari manajemen sumber daya manusia, yang paling banyak menerapkan adalah bidang pelatihan dan pengembangan, rekruitmen dan seleksi, dan sistem remunerasi. Ruky (2003) mengemukakan konsep kompetensi sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan alasan, yaitu:

1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Model kompetensi akan mampu menjawab dua pertanyaan mendasar yaitu keterampilan,

pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh langsung dengan prestasi kerja.

2. Alat seleksi karyawan, penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat membantu organisasi untuk memilih calon karyawan yang terbaik.
3. Memaksimalkan produktivitas, tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi "ramping" mengharuskan kita untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga mampu untuk dimobilisasikan secara vertikal maupun horizontal.
4. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi (imbalan) yang akan dianggap adil.
5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Model kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah.
6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.

2.2.2.4. Indikator Kompetensi Aparatur

Gordon (1988) menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan

bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.

2. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
4. Nilai (*value*) adalah suatu standar perilaku yang lebih diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri sesorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).
5. Sikap (*attitude*) adalah perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan sebagainya.
6. Minat (*interest*) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan suatu aktivitas kerja.

2.2.3. Komitmen Organisasi

2.2.3.1. Pengertian Komitmen Organisasi

Pandangan berbagai pakar mengenai pengertian komitmen sangat beragam, ada pakar yang menyatakan sebagai komitmen namun ada pula yang menyatakan

sebagai komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah perasaan, sikap, dan perilaku individu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi, untuk terlibat dalam proses kegiatan sebuah organisasi dan loyal terhadap organisasi dalam mencapai sebuah tujuan organisasi (Wibowo, 2007:431). Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2008:184) menyatakan bahwa komitmen adalah perasaan identifikasi, pelibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pekerjaan terhadap perusahaan, komitmen menyangkut tiga sifat yaitu perasaan identifikasi dengan tujuan organisasi, perasaan terlibat dalam tugas organisasi, dan perasaan loyal pada organisasi. Wibowo (2017: 214) menyatakan "Komitmen pada dasarnya adalah merupakan kesediaan seseorang untuk mengikatkan diri dan menunjukkan loyalitas pada organisasi karena merasakan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi". Greenberg dan Baron (2003: 160) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu tingkatan dimana individu mengidentifikasi dan terlibat dengan organisasinya dan/atau tidak ingin meninggalkan organisasi tersebut. Ikhsan dan Ishak (2005: 35) mengatakan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat seberapa jauh seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah perasaan, sikap, dan perilaku individu dalam memberikan loyalitas dan mempunyai niat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

2.2.3.2. Tipe Komitmen Organisasi

Schermerhorn, Hunt, Osborn, dan Uhl-Bien (2011: 72) mengemukakan bahwa terdapat dua dimensi utama komitmen organisasional, yaitu *Rational Commitment* dan *Emotional Commitment*. *Rational Commitment* mencerminkan bahwa pekerjaan memberikan pelayanan pada kepentingan finansial, pengembangan, dan profesional individu. Berbeda dengan *Emotional Commitment* yang mencerminkan perasaan bahwa apa yang dilakukan seseorang adalah penting, berharga dan memberikan manfaat nyata bagi orang lain.

Dimensi komitmen menurut Luthans (2011:148) terdapat tiga macam tipe komitmen, yaitu :

1. *Affective Commitment*, adalah keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi karena ketertarikan emosional pada organisasi, dan keterlibatan dengan organisasi. Mereka tinggal karena mereka menginginkan sebagai alasan emosional, atau *emotion-base*, dapat berupa perasaan persahabatan, iklim atau budaya perusahaan, dan perasaan kesenangan ketika menyelesaikan tugas pekerjaan.
2. *Continuance Commitment*, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi karena kepedulian atas biaya yang berkaitan apabila meninggalkannya. Mereka tinggal karena mereka perlu, ini merupakan *cost-based reason* untuk tetap termasuk masalah gaji, tunjangan dan promosi, serta yang berkaitan dengan menumbangkan keluarga.
3. *Normative Commitment*, adalah keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi karena merasa sebagai kewajiban. Mereka tetap tinggal karena

memang seharusnya, hal ini merupakan alasan *obligation-based* untuk tetap dalam organisasi, termasuk perasaan utang budi pada atasan, kolega, atau perusahaan yang lebih besar.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mcshane dan Von Glinow (2010: 112), menurut mereka *Organizational Commitment* sama dengan *Affective Commitment*, yaitu sebagai keterikatan emosional pekerja, identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi tertentu. Sedangkan *Organizational Commitment* berbeda dengan *Continuance Commitment* yang merupakan keterikatan kalkulatif. Pekerja mempunyai *Continuance Commitment* tinggi ketika mereka tidak mengidentifikasi secara khusus dengan organisasi dimana mereka bekerja, tetapi merasa terikat untuk tetap di sana karena terlalu mahal untuk keluar.

2.2.3.3. Membangun Komitmen Organisasi

Determinan komitmen organisasi berada diluar kontrol manajer, sehingga memberikan sedikit peluang untuk meningkatkan perasaan. Komitmen cenderung menurun ketika peluang kerja banyak. Banyaknya pekerjaan dapat menurunkan *Continuance Commitment*. Meskipun manajer tidak dapat mengontrol ekonomi eksternal, mereka dapat melakukan beberapa hal membuat pekerja ingin tetap bekerja untuk perusahaan.

Pekerja yang mempunyai komitmen adalah pekerja yang sangat berharga, karena kita dapat memperoleh komitmen dari karyawan dengan memenuhi kebutuhan pokok pekerja, memberi perhatian pada orang di semua tingkat, mempercayai dan dipercayai, mentoleransi individualitas, dan menciptakan bebas

kesalahan "*can-do-culture*" pernyataan tesebut dikemukakan oleh Heller (1999:18) dalam Wibowo (2017:217).

Heller (1999) mengajukan untuk mendapatkan komitmen organisasi pekerja dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. *Nuturing trust*, memelihara kepercayaan. Memiliki kualitas dalam memimpin merupakan faktor utama untuk mendapatkan kepercayaan dan komitmen pekerja.
2. *Winning minds, spirits, and hearts*, memenangkan pikiran, semangat, dan hati. Komitmen penuh dari bawahan tidak dapat direalisir sampai dapat menunjukkan kebutuhan psikologis, intelektual, dan emosional pekerja.
3. *Keeping Staff commited*, menjaga staf mempunyai komitmen. Salah satu cara paling efektif menjaga komitmen pekerja adalah memperkaya pekerjaan dan meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja.
4. *Rewarding excellence*, menghargai keunggulan. Mengakui keunggulan karyawan merupakan masalah vital dalam memelihara komitmen dan kepuasan kerja pekerja.
5. *Staying positive*, bersikap positif. Menciptakan lingkungan yang postitif sangat penting dalam menciptakan iklim yang baik untuk pekerja dalam bekerja.

2.2.3.4. Indikator Komitmen Organisasi

Luthans (2011:148) terdapat tiga macam tipe komitmen, yaitu :

1. *Affective Commitment*, adalah keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi karena ketertarikan emosional pada organisasi, dan keterlibatan dengan organisasi. Mereka tinggal karena mereka menginginkan sebagai alasan

emosional, atau *emotion-base*, dapat berupa perasaan persahabatan, iklim atau budaya perusahaan, dan perasaan kesenangan ketika menyelesaikan tugas pekerjaan.

2. *Continuance Commitment*, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi karena kepedulian atas biaya yang berkaitan apabila meninggalkannya. Mereka tinggal karena mereka perlu, ini merupakan *cost-based reason* untuk tetap termasuk masalah gaji, tunjangan dan promosi, serta yang berkaitan dengan menumbangkan keluarga.
3. *Normative Commitment*, adalah keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi karena merasa sebagai kewajiban. Mereka tetap tinggal karena memang seharusnya, hal ini merupakan alasan *obligation-based* untuk tetap dalam organisasi, termasuk perasaan utang budi pada atasan, kolega, atau perusahaan yang lebih besar.

2.2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.2.4.1. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Haag dan Keen (1996) menyatakan "Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Martin (1999) mengemukakan bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi atau data melainkan juga mencakup teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau data. Kadir dan Triwahyuni (2005:2) menyatakan "Teknologi informasi adalah gabungan antara

teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi". Teknologi informasi adalah teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap atau memperoleh, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, dan menyebarkan informasi tersebut serta sebagai sarana dalam meningkatkan pengguanan teknologi informasi tersebut. (Wansyah, dkk, 2009 dalam Komarasari, 2017). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Haza, 2015). Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer. Komputer merupakan salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang dapat melipat gandakan kemampuan yang dimiliki seseorang. Komputer juga dapat mengerjakan hal yang mungkin tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Sedangkan teknologi komunikasi atau teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, seperti telepon radio, televisi dan internet. Komarasari (2017) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi adalah peranan dari pengelolaan informasi dan transaksi elektronik untuk meningkatkan kinerja organsiasi/instansi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan *e-goverment*. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu peran sistem dari perkembangan teknologi yang dapat menerima informasi, menyimpan informasi serta membagikan informasi tersebut secara cepat dan mudah sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

2.2.4.2. Pengelompokan Teknologi Informasi

Telah diketahui bahwa teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 teknologi yaitu: teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin pemroses (Kadir dan Triwahyuni, 2005:5).

1. Teknologi Masukan

   Teknologi masukan adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Perangkat masukan yang sering dijumpai adalah *keyboard* dan *mouse*.

2. Mesin Pemroses

   Mesin pemrores seperti CPU merupakan bagian dalam komputer yang menjadi pusat pengolah data dengan cara menjalankan program yang mengatur pengolahan tersebut.

3. Teknologi Penyimpan

   Teknologi penyimpan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu memori internal dan penyimpan eksternal. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sementara baik bagi data, program, maupun informasi ketika proses pengolahannya dilakukan oleh CPU. Sedangkan penyimpan eksternal dikenal juga dengan sebutan penyimpan sekunder. Penyimpan sekunder adalah segala perangkat yang berfungsi untuk menyimpan secara permanen.

4. Teknologi Keluaran

Teknologi keluaran adalah teknologi yang berhubungan dengan segala perangkat yang berfungsi untuk mengajikan informasi hasil pengolahan sistem.

5. Teknologi Perangkat Lunak

   Perangkat lunak atau dikenal juga dengan program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya.

2.2.4.3. Komponen Sistem Teknologi Informasi

Sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan *printer*, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu *software*, dan yang lebih penting lagi adalah orang. Komponen utama sistem teknologi informasi adalah berupa:

1. Perangkat keras (*hardware*),
2. Perangkat lunak (*software*), dan
3. Orang (*brainware*).

2.2.4.4. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi menurut Jurnali dan Supomo (2002), teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini menjadi perhatian :

1. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
2. Jaringan komputer telah dimanfaaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
3. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi

4. Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi

2.2.5. Tingkat Pendidikan

2.2.5.1. Pengertian Tingkat Pendidikan

Sikula dalam Mangkunegara (2009:50) "tingkat pendidikan merupakan suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum". Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar mereka dapat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dan atau dengan cara lain yang diakui oleh masyarakat (Minarti, 2016: 247). Nasution (1999) dalam Minarti (2016: 247) menyatakan "Pendidikan juga merupakan investasi yang paling utama bagi bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang. Pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan melalui pendidikan". Pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai sebuah tujuan, tujuan tersebut adalah kedewasaan (Langeveld dalam Munib, 2015:28). Pengertian pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003, pedidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan merupakan suatu proses jangka panjang dengan menggunakan prosedur yang dapat meningkatkan

kemampuan dan pengetahuan seseorang serta dapat menjadikan seseorang tersebut dewasa.

2.2.5.2. Ruang Lingkup Pendidikan

Pada hakikatnya pendidikan merupakan proses yang panjang yang berlangsung sepanjang hayat, yang dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyararakat. Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama, yaitu keluarga, masyarakat dan pemerintah. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 13 (1) yang secara lengkap berbunyi "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat melengkapi". Pendidikan formal merupakan pendidikan yang mempunyai bentuk atau organisasi tertentu, pendidikan non formal merupakan pendidikan yang diperoleh melalui kegiatan kursus maupun pelatihan, sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh dalam lingkungan keluarga.

2.2.5.3. Tujuan Pendidikan

Menurut Munib (2015:162),

> "Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran (2017) menyatakan bahwa tujuan pendidikan merupakan yang sifatnya umum dan sering kali disebut dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

2.2.5.4. Indikator Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan dalam pendidikan tersebut (Munib, 2015:167). Tingkat pendidikan formal menurut UU No. 20 Tahun 2003 terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah ini berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Selanjutnya, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Berdasarkan hal tersebut indikator untuk tingkat pendidikan adalah pendidikan formal, yang terdiri dari tingkat SD, SMP, SMA, Diploma, dan Strata.

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis pengelolaan dana desa. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini, guna menjadi acuan dan pedoman dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Medianti, Larastika (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa	1. Variabel kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. 2. Variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. 3. Variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
2.	Aulia, Putri (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota	1. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
			4. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3.	Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi. dan Hendrik Gamaliel (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo	1. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	Murina, Sasha dan Rahmawaty (2017)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh)	1. Tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan pengalaman kerja berpengaruh secara bersamasama terhadap pemahaman laporan keuangan desa. 2. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa. 3. Kualitas pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa. 4. Pengalaman kerja berpengaruh terhadap

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
			pemahaman laporan keuangan desa.
5.	Widyatama, Arif, Lola Novita, dan Diarespati (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	1. Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD 2. Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD.
6.	Wardani, Dewi Kusuma dan Ika Andriyani (2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten	1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa.
7.	Marlinawati dan Dewi Kusuma Wardani (2018)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa	1. Kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. 2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
			berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. 3. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
8.	Karmila, Amries Rusli Tanjung, dan Edfan Darlis (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)	1. Kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 3. Pengendalian intern tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
9.	Fernanda, Hendrick (2014)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan	1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
		Keuangan Pemerintah Daerah	2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah
10.	Azlina, Nur, Amir Hasan, Desmiyawati dan Iskandar Muda (2017)	*The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau*	1. Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah ke desa-desa telah dikelola sesuai ketentuan peraturan, hampir tepat sasaran. Namun masih ada beberapa kebutuhan warga desa yang belum tersentuh oleh pembangunan pedesaan 2. Namun, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah ke pemerintah desa agak terlambat pengembangan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa dapat dilakukan tepat waktu. Ini bisa dilihat dari realisasi dana desa yang terealisasi hampir 100%. 3. Semua kegiatan yang bersumber dari dana desa telah dilaporkan oleh desa dalam bentuk Laporan Realisasi Dana Desa, dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Komunitas Pemberdayaan dan Administrasi Desa (DPMPD) sebagai bagian dari laporan keuangan resmi. Dalam menyiapkan Laporan ini desa belum

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
			mandiri, masih dibantu oleh tenaga akuntansi (Staf dari Kabupaten)
11.	Kurrohman, Taufik (2015)	*Accountability of Planning on Village Fund Allocation in Osing Community in Banyuwangi*	Hasil dari penelitian tersebut yaitu perencanaan penggunaan dana ADD harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat dikenali melalui aspirasi yang, dalam hal ini, dilaksanakan melalui forum komunitas. Dalam komunitas Osing, pola perencanaan penggunaan dana ADD adalah dengan mengambil tilik dusun (kunjungan dusun) pertama dan kemudian diikuti oleh forum komunitas. Melalui mekanisme ini, tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Tingginya tingkat partisipasi adalah karena pelaksanaan tilik dusun dan forum desa yaitu selalu diadakan bersamaan dengan acara desa yang melibatkan banyak orang di desa Osing, mengingat karakteristik Osing anggota masyarakat yang mendukung upacara tradisional dan cara serupa. Selain itu, hasil keputusan dari setiap tilik dusun dan pertemuan desa selalu dilampirkan pada informasi papan disediakan oleh desa untuk akses mudah oleh

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
			penduduk desa. Untuk penelitian lebih lanjut, perlu untuk memeriksa fenomena implementasi anggaran dan akuntabilitas penggunaan dana ADD.
12.	Umar, Haryono, Sidin Usman, dan Rahima Br. Purba (2018)	*The Influence Of Internal Control And Competence Of Human Resources On Village Fund Management And The Implications On The Quality Of Village Financial Reports*	1. Kompetensi sumber daya manusia secara positif mempengaruhi implementasi pengelolaan dana desa (VFM) di Indonesia 10 desa di Kabupaten Gane Barat. Semakin tinggi staf pemerintah desa memiliki kompetensi, semakin baik pengelolaan keuangan desa di tingkat pemerintahan desa akan menjadi. 2. Kontrol internal berdampak positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dilakukan dengan baik sistem pengendalian internal akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang lebih baik di 10 desa Gane Barat. Kompetensi sumber daya manusia secara positif dan signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa 10 desa di Kabupaten Gane Barat. Kualitas laporan keuangan desa

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
			dihasilkan oleh desa pemerintah cenderung ditingkatkan asalkan pejabat pemerintah desa memperoleh yang lebih tinggi kompetensi. 3. Kontrol internal secara positif memengaruhi KLKDes (VFRQ) melalui peningkatan efek kontrol internal implementasi pada peningkatan kualitas laporan keuangan desa. 4. Manajemen dana desa memiliki efek positif pada kualitas laporan keuangan desa. Itu semakin baik pengelolaan keuangan desa, semakin baik kualitas laporan keuangan desa.
13.	Anto, Rola Pola dan Muhammad Amir (2017)	*Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in North Konawe Regency- Indonesia*	1. Kompetensi Pengetahuan aparat desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Konawe Utara masih minim karena tingkat pendidikan aparatur desa menengah ke atas atau sederajat 2. Kompetensi keterampilan aparat desa dalam mengelola dana desa di Kabupaten Konawe Utara masih minim karena tingkat pendidikan yang rendah perangkat desa sehingga

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
			kemampuan penguasaan pekerjaan secara teknis lemah, seperti pelaporan keuangan dan computer kontrol 3. Kompetensi motif aparat desa di desa pengelolaan dana di Konawe Utara didasarkan pada niat atau pemikiran yang kuat untuk didorong ke dana desa manajemen yang baik dan benar untuk mewujudkan pembangunan pedesaan yang maju, mandiri dan sejahtera 4. Kompetensi aparat desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Konawe Utara dibuktikan dengan tindakan yang baik dan tepat dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan pedoman dan ketentuan teknis dalam hukum dan peraturan yang berlaku 5. Kompetensi konsep diri aparat desa di Kabupaten Konawe Utara dalam pengelolaan dana desa dibuktikan dengan minat atau sikap yang mendukung dan mendukung pengelolaan dana desa yang bersumber dari Penerimaan Negara dan Anggaran Belanja sesuai

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
			dengan ketentuan yang berlaku untuk digunakan dalam administrasi desa administrasi, fasilitas, bimbingan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang makmur, maju dan mandiri.
14.	Dewi, Ni Komang Ayu Julia Praba dan Gayatri (2019)	Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi, kepemimpinan, dan partisipasi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin tinggi.

2.4. Kerangka Berfikir

2.4.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pengelolaan Dana Desa

Mengelola dana desa adalah salah satu tugas dari aparatur pemerintah desa. Teori *Stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991) menyatakan bahwa para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada kepentingan organisasi. Para manajer menginginkan hasil yang terbaik dalam

tugasnya. Teori ini cocok untuk digunakan dalam instansi pemerintah. Aparatur pemerintah desa memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola dana desa. Aparatur pengelola dana desa mengharapkan hasil yang terbaik dari pekerjaan yang sudah dikerjakan. Hasil terbaik ini akan diperoleh apabila aparatur pengelola dana desa memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mengelola dana desa. Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam organisasi. Modal yang dimaksud yaitu pengetahuan, keterampilan, kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Wibowo (2007:21) menyatakan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerja tersebut. Penelitian Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017) menghasilkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sehingga tinggi-rendahnya kompetensi aparat pemerintah desa merupakan faktor penghambat atau tidaknya pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah dimilikinya.

Kompetensi aparatur desa yang baik sudah pasti akan mendukung pengelolaan dana desa dengan baik. Sebaliknya apabila aparatur desa belum memiliki kompetensi yang baik akan menghambat pengelolaan dana desa agar mempunyai hasil yang baik. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur pengaruh kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

2.4.2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Teori *Stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991) mengemukakan bahwa dalam sebuah organisasi para manajer tidak termotivasi oleh kepentinan individu, akan tetapi lebih ditujukan pada hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori yang lebih cocok untuk instansi pemerintah ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan dana desa oleh aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa harus mengutamakan hasil yang dari tugas mereka mengelola dana desa tanpa adanya motivasi untuk kepentingan individu. Hasil yang baik ini akan mereka dapatkan apabila mereka memiliki komitmen dalam menjalankan tugas mereka. Wibowo (2007:431) menyatakan komitmen organisasi adalah perasaan, sikap, dan perilaku individu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi, untuk terlibat dalam proses kegiatan sebuah organisasi dan loyal terhadap organisasi dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Sebuah organisasi memang tidak bisa lepas dari komponen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam organisasi. Sumber daya manusia harus memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Hal lain yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia selain kompetensi dalam hal ini merupakan aparatur pemerintah desa yaitu komitmen organisasi. Komitmen merupakan perasaan, sikap dan perilaku individu dalam memberikan loyalitas dan mempunyai niat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam sebuah organisasi.

Aulia (2018) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa secara akuntabel dilaksanakan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa

merupakan tugas dari aparatur pemerintah desa. Komitmen organisasi aparatur pemerintah desa dirasa sangat perlu untuk dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Ketika komitmen organisasi aparatur pemerintah desa tinggi, pengelolaan dana desa akan dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga hasil pengelolaan yang dilakukan akan sesuai yang diharapkan. Berbeda jika aparatur tidak memiliki komitmen yang tinggi dikhawatirkan akan mengerjakan tugas yang diberikan tidak sesuai yang seharusnya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur pengaruh komitmen organisasi dalam pengelolaan dana desa.

2.4.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Setiap manajer ingin hasil yang terbaik untuk kepentingan organisasinya. Hal ini dijelaskan oleh Teori *Stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991) bahwa manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil mereka untuk kepentingan organisasi. Instansi pemerintah desa yang prinsipalnya menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat memiliki salah satu tugas yaitu mengelola dana desa. Aparatur pengelola dana desa memiliki tujuan memberikan hasil yang baik untuk tugasnya dalam mengelola dana desa. Hal ini dapat terpenuhi apabila aparatur pengelola dana desa dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Teknologi informasi merupakan suatu sistem dari perkembangan teknologi yang dapat menerima informasi, menyimpan informasi serta membagikan informasi tersebut secara cepat dan mudah. Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan dalam mengirimkan informasi dan data (Kadir dan Triwahyuni, 2005:2).

Komarasari (2017) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi adalah peranan dari pengelolaan informasi dan transaksi elektronik untuk meningkatkan kinerja organsiasi/ instansi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan *e-goverment*. Teknologi informasi diharapkan dapat memudahkan pekerjaan setiap orang. Karyawan atau dalam pengelolaan dana desa merupakan aparatur pemerintah desa dapat menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan pekerjaannya.

Teknologi informasi yang dapat menerima informasi, menyimpan informasi dan membagikan informasi ini sangat memudahkan aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Sesama aparatur pemerintah desa dapat saling bertukar informasi tentang pengelolaan dana desa. Informasi yang didapat aparatur dirasa dapat membantu aparatur dalam menjalankan tugasnya. Teknologi yang mumpuni berupa komputer dan internet dapat memudahkan pengelolaan dana desa. Berbeda jika teknologi informasi dalam suatu desa tidak dimanfaatkan dengan baik atau belum mumpuni, desa akan tertinggal dalam mendapatkan informasi dan diduga akan mengalami kendala dalam pengelolalaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa.

2.4.4. Peran Tingkat Pendidikan dalam Memperkuat Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pengelolaan Dana Desa

Menurut Donaldson dan Davis (1991) Teori *Stewardship* adalah teori yang menjelaskan bahwa para manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada hasil yang baik untuk kepentingan organisasi. Aparatur

pemerintah desa yang memiliki tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa berorientasi mendapatkan laba, memiliki salah satu tugas yaitu mengelola dana desa. Hasil pengelolaan dana desa akan baik apabila aparatur pemerintah desa memiliki kompetensi untuk mengelola dana desa tersebut. Kompetensi sumber daya manusia sangat penting dalam sebuah organisasi. Kompetensi yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap ini dapat diperoleh seseorang melalui sebuah proses yang dinamakan pendidikan. Pengetahuan, keterampilan dan sikap seseorang dapat bertambah ketika orang tersebut belajar dan menempuh pendidikan yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Pendidikan merupakan proses belajar mengajar guna dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sikula dalam Mangkunegara (2009:50) menyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan, konseptual dan teoritis untuk tujuan yang umum. Marina dan Rahmawaty (2017) menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk menghimpun dan meningkatkan pengetahuan. Pendidikan diperoleh melalui pembelajaran secara terstruktur dan dalam waktu yang relatif lama.

Hal yang diharapkan ketika tingkat pendidikan seorang karyawan atau aparatur pemertintah desa tinggi yaitu seorang aparatur tersebut memilki kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Faktor selain tingkat pendidikan yaitu keselarasan jurusan dalam penempatan posisi kerja juga diduga memberikan pengaruh terhadap kinerja seorang aparatur pemerintah. Pengelolaan

dana desa yang harus dilakukan orang yang kompeten tentu tidak sembarang orang dapat melakukannya. Orang yang memiliki pendidikan yang sesuai dan jurusan yang sesuai yang biasanya melakukan pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengukur peran tingkat pendidikan dalam memoderasi pengaruh kompetensi aparatur dalam pengelolaan dana desa.

2.4.5. Peran Tingkat Pendidikan dalam Memperkuat Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Teori *Stewardship* (Donaldson dan Davin, 1991) menjelastan tentang situasi para manajer yang tidak memiliki motivasi untuk kepentingan individu, akan tetapi motivasi para manajer lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi yang dicita-citakan. Mengelola dana desa adalah salah satu tugas dari aparat pengelola dana desa. Seorang aparat pengelola dana desa harus memiliki komitmen untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Aparat pengelola dana desa tidak hanya harus memiliki kompetensi tetapi juga harus memiliki komitmen organisasi. Komitmen organisasi yang seharusnya dimiliki oleh karyawan juga dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Kompetensi bisa lahir dari diri orang masing-masing. Komitmen organisasi dapat ditumbuhkan melalui rasa nyaman yang dimiliki seseorang dalam organisasi yang diikutinya.

Minarti (2016: 247) menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar mereka dapat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dan atau dengan cara lain yang diakui oleh masyarakat. Organisasi yang diikuti seseorang dan rasa nyaman yang dimiliki seorang karyawan atau seorang aparatur pemerintah desa merupakan organisasi

yang diikutinya secara suka rela. Organisasi ini bisa diikuti sejak masa sekolah untuk mengembangkan diri mereka. Waktu masa sekolah seseorang yang suka berorganisasi akan mengikuti banyak organisasi. Berdasarkan pengalaman tersebut komitmen mereka dalam berorganisasi diuji dengan adanya berbagai persoalan. Berdasarkan pengalaman dalam pendidikan dan berkomitmen dengan organisasi yang diikuti sebelumnya dapat meningkatkan komitmen seseorang dalam bekerja di suatu instansi atau perusahaan. Medianti (2018) menyatakan bahwa organisasi dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan tujuan organisasi yaitu pemerintah desa. Berdasarkan uaraian di atas, penelitian ini bermaksud mengukur peran tingkat pendidikan dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa.

2.4.6. Peran Tingkat Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Menurut Donaldson dan Davis (1991) Teori *Stewardship* adalah teori yang menjelaskan situasi para manajer yang tidak memiliki motivasi untuk tujuan-tujuan individu, akan tetapi para manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk mencapai cita-cita organisasi. Teori ini lebih cocok digunakan dalam instansi pemerintah, salah satunya pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa memiliki salah satu tugas yaitu mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa harus dilakukan orang yang kompeten dan mampu memanfaatkan teknologi informasi agar hasil dari pengelolaan dana desa sesuai dengan cita-cita aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa. Teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi komunikasi dan teknologi komputer. Teknologi informasi ini merupakan teknologi

yang dapat memudahkan kerja karyawan ketika karyawan tersebut dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Seseorang dalam perusahaan atau dalam hal ini pemerintah desa harus mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan benar. Sebab dengan kemajuan zaman yang sangat pesat, sumber daya manusia harus mengimbangi kemajuan tersebut. Marniawati dan Wardani (2018) menyatakan bahwa pemafaatan teknologi informasi merupakan tingkat integritas teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi.

Teknologi informasi yang harus dimanfaatkan dengan baik tersebut dapat dipelajari ketika di bangku sekolah. Sehingga pendidikan salah satu hal yang penting dalam upaya dapat memahami teknologi informasi dengan baik. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sangat disayangkan apabila banyak aparatur pemerintah desa yang belum dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik karena terkendala tingkat pendidikan yang belum memadai. Oleh karena itu diharapkan ketika aparatur pemerintah desa memiliki jenjang pendidikan yang tinggi diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, sehingga dapat melakukan pengelolaan dana desa dengan baik pula. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengukur peran tingkat pendidikan dalam memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tingkat pendidikan (M)

memoderasi pengaruh kompetensi aparatur (X_1), komitmen organisasi (X_2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X_3) terhadap pengelolaan dana desa (Y). Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

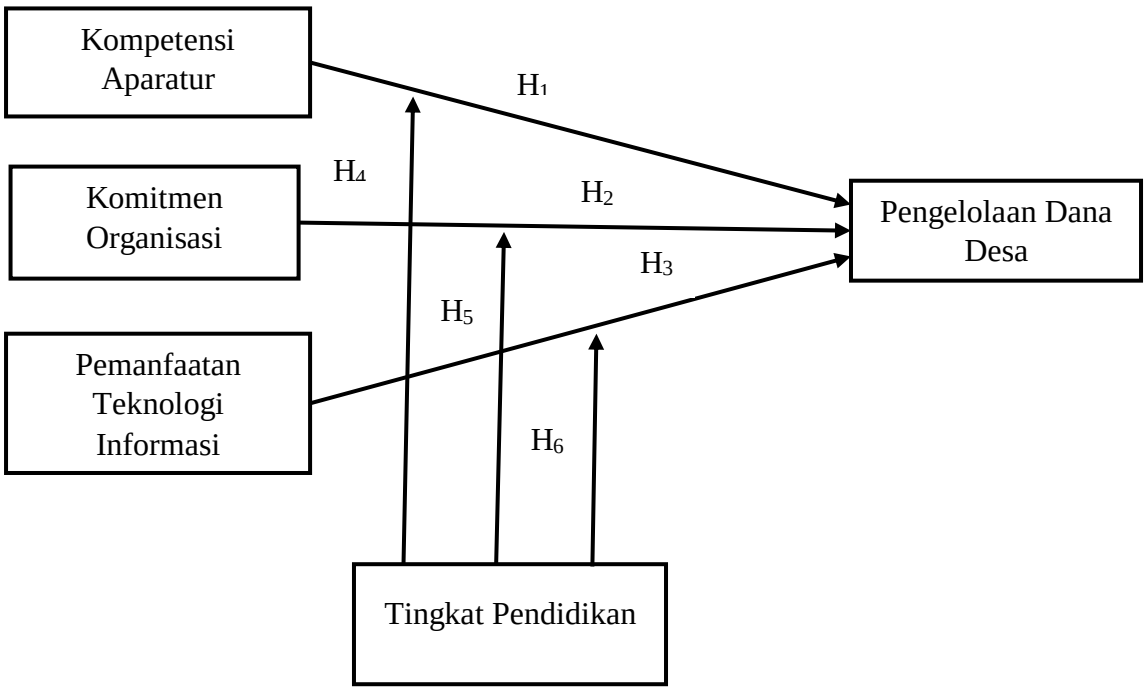

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka berfikir di atas, maka hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_1: Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H_2: Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H_3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H_4: Tingkat pendidikan memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan dana desa.

H_5: Tingkat pendidikan memperkuat pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa.

H_6: Tingkat pendidikan memperkuat pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambi kesimpulan sebagai berikut:

1) Kompetensi aparatur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.
2) Komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.
3) Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.
4) Tingkat pendidikan memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.
5) Tingkat pendidikan tidak memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.
6) Tingkat pendidikan tidak memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis berikan adalah:

1) Kompetensi aparatur pemerintah desa di Kecamatan Tambakromo termasuk dalam kategori tinggi. Capaian tersebut harus dipertahankan, oleh karena itu aparatur pengelola dana desa disarankan mengikuti pelatihan dan membaca literatur mengenai pengelolaan dana desa.
2) Pemanfaatan teknologi pemerintah desa di Kecamatan Tambakromo termasuk dalam kategori tinggi. Capaian tersebut harus dipertahankan, oleh karena itu aparatur pengelola dana desa disarankan mengadakan pelatihan siskeudes untuk setiap pengelola dana desa dan perangkat yang lain, untuk mengantisipasi pergantian operator sewaktu-waktu.
3) Komitmen organisasi aparatur pemerintah desa di Kecamatan Tambakromo termasuk dalam kategori tinggi, akan tetapi dalam komitmen kelanjutan masih rendah, aparatur pemerintah desa seharusnya meningkatkan komitmen kelanjutan terhadap pemerintah desa dengan cara dari pemerintah desa memberikan *reward* kepada aparatur pemerintah desa yang berprestasi dan memiliki kinerja yang bagus khususnya aparatur pengelola dana desa.
4) Bagi pemerintah desa dalam perekrutan aparatur pemerintah desa khususnya aparatur pengelola dana desa diberikan persyaratan khusus, seperti pendidikan terakhir linier dengan formasi yang akan diisi oleh pendaftar, dan memiliki keahlian khusus yang nantinya diperlukan dalam pengelolaan dana desa, seperti mampu mengoperasikan aplikasi *microsoft*.
5) Bagi peniliti selanjutnya, karena hasil pengaruh langsung kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa masih sangat kecil, bisa diteliti faktor lain yang mempengaruhi

pengelolaan dana desa seperti dengan mengerucutkan pemanfaatan teknologi informasi menjadi penggunaan *software* sesuai undang-undang atau siskeudes, yang diduga penggunaan siskeudes memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, Putu Widya dan Ni Gusti Putu Wirawati. 2018. Pengaruh Usia, Pengalaman Kerja, Tingkatb Pendidikan dan Kompleksitas Tugas terhadap Efektivitas Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. E-Jurnal Akuntasni Universitas Udayana. Vol 22 No. 3

Anto, Rola Pola dan Muhammad Amir. 2017. *Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in North Konawe Regency- Indonesia*. *IOSR Journal of Business and Management*. Vol. 19 No. 11: hal 66-71

Armstrong, M. dan Baron, A. 1998. *Performance Management – The New Realities*. London: Institute of Personnel and Development

Aulia, Putri. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. JOM FEB. Vol. 1 No. 1: hal. 1-15

Azlina, Nur,dkk. 2017. *The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau*. *International Journal of Economic Research*.Vol. 14 No. 12: hal 325-336

Dewi, Ni Komang Ayu Julia Praba dan Gayatri. 2019. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 26. No. 2. DOI: https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16

Donaldson, Lex dan James H, Davis. 1991. *Stewardship* Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management. Vol. 16. No. 1

Fernanda, Hendrick. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Negeri Padang

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penebit Universitas Diponegoro

Gordon. (1988). *Pembelajaran Kompetensi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Greenberg, J. dan Robert A. Baron. 2003. *Behavior in Organization International Edition.* New Jersey: Prentice Hall.

Haag, S dan Keen P. 1996. *Information Technology, Tomorrow's Advantage Today*. McGraw-Hill.

Haza, Irfan Ikhwanul. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). Universitas Negeri Padang

Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2005. *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat

Indrajaya, Johan Arief. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

Ivancevich, Konopaske, dan Matteson. 2008. *Organizational Behavior and Management*. New York: McGraw-Hill International

Jayanti, A.A. Sg. Siskarini, I Wayan Gede Supartha dan Made Subudi. 2016. Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Komitmen Organisasi dan Prestasi Kerja pada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. E- Jurnal Ekonomi dna Bisnis Universitas Udayana.Vol. 5.No. 11

Jurnali, Teddy dan Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Akuntan Publik. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. 5(2):214-226.

Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. 2005. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarata: ANDI

Karmila, Amries Rusli Tanjung dan Edfan Darlis. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau). Jurnal SOROT. Vol. 9 No. 1: hal 1-121

Kementrian Keuangan Republik Indonesia.2017. *Buku Saku Dana Desa*.

Komarasari, Warih. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengenadalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Universitas PGRI Yogyakarta

Kurrohman, Taufik. 2015. *Accountability of planning on village fund allocation in osing community in Banyuwangi*. International Conference On Acoounting Studies (hal. 319-324). Johor Bahru

Luthans, Fred. 2011. *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill/Irwin.

Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi dan Hendrik Gamaliel. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Universitas Sam Ratulangi

Mandang, Evert Fandi, Bode Lumanauw dan Mac D.B. Walangitan. 2017. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Manado. Jurnal EMBA. Vol. 5. No. 3

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Marlinawati dan Dewi Kusuma. 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Jurnal Kajian Bisnis. Vol. 26 No. 2: hal 131-143

Martin, E. 1999. *Managing Information Technology What Managers Need to Know* . New Jersey: Pearson Education International.

Mcshane, Steven L dan Von Glinow, Mary A. 2010. *Organizational Behaviour-Emerging Knowledge and Practice For The Real World*. New York: McGraw-Hill

Medianti, Larasantika. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. JOM FEB. Vol. 1 No. 1: hal. 1-13

Minarti, Sri. 2016. *Manajemen Sekolah*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA

Munib, Achmad. 2015 *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT UNNES PRESS

Murina, Sasha dan Rahmawaty. 2017. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 2 No. 3: hal. 111-120

Nasir, A., & Oktari, R. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). Jurnal Ekonomi, Vol.19 No. 2.

Nasrulhak, Akfa. Ada 1.371 Kasus Pelanggaran Dana Desa, Kemendes Perkuat Sinergi. *Detik News*.29 November 2018. Online. Tersedia di: https://news.detik.com/berita/d-4323664/ada-1371-kasus-pelanggaran-dana-desa-kemendes-perkuat-sinergi?_ga=2.154502586.346634324.1545255852-742135249.1545255851. Diakses tanggal 20 Desember 2018.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Perdana, Khaeril Wahyu. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Robbins SP, & Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Ruky, H. Achamd S.2003. *Sumber Daya Manusia Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Santosa, Hendri. Mencegah Korupsi Dana Desa. *Suara Merdeka*, 20 Desember 2018.

Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., Osborn, R. N., dan Uhj-Bien, M. 2011. *Organizational Behavior*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc

Spencer, Lyle dan Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada : John Wiley & Sons, Inc

Suara Pati (16 April 2018) Online. Puluhan Warga Desa Karangwono Geruduk Kantor Kecamatan Tambakromo Pati. Tersedia di: http://suarapatinews.com/index.php/2018/04/16/puluhan-warga-desa-karangwono-geruduk-kantor-kecamatan-tambakromo-pati/. Diakses tanggal 3 Januari 2019.

Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: PT. Tarsito Bandung

Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Sutrisno Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana

Umar, Haryono, Sidin Usman dan Rahima Br. Purba. 2018. *The Influence Of Internal Control And Competence Of Human Resources On Village Fund Management And The Implications On The Quality Of Village Financial Reports*. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). Vol. 9 No. 7: hal 1523-1531

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wardani, Dewi Kusuma dan Ika Andriyani. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi. Vol. 5 No. 2: hal: 88-98

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Wibowo. 2017. *Perilaku Dalam Organisasi*. Depok. PT RajaGrafindo Persada

Widyatama, Arif, Lola Novita dan Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 2. No. 2: hal. 1-20.

Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.